

**Konflik Air Lintas Batas: Kajian Hukum Internasional atas Hak
Pemanfaatan Sungai Mekong**
*Transboundary Water Conflict: An International Legal Study of Mekong
River Utilization*

Risa Susanto

*Law Study Program, Faculty of Digital Business and Law, Universitas Kristen
Maranatha*

Jl. Prof. drg. Suria Sumantri No. 65, Bandung, 40142

risasusanto96@gmail.com

Submitted: 2025-09-17 | Reviewed: 2025-09-26 | Revised: 2025-09-29 | Accepted: 2025-09-29

ABSTRAK

Sungai Mekong sebagai salah satu sungai lintas batas terpanjang di dunia menjadi sumber kehidupan penting bagi negara-negara di sepanjang alirannya. Pemanfaatan air sungai untuk irigasi, perikanan, pembangkit listrik, dan transportasi menimbulkan kompleksitas antarnegara hulu dan hilir, terutama terkait pembangunan bendungan yang berdampak signifikan pada aliran dan ekosistem sungai. Konflik kepentingan ini diperparah dengan tidak bergabungnya negara hulu dalam kerja sama regional seperti *Mekong River Commission* (MRC) serta ketidakjelasan kerangka hukum internasional yang mengatur sungai lintas batas. Studi ini menelaah dinamika konflik sumber daya air di Sungai Mekong dan mengevaluasi instrumen hukum internasional yang tersedia sebagai rujukan penyelesaian sengketa, meskipun belum memiliki daya paksa yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum internasional, Konvensi PBB 1997 tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Sungai Lintas Batas (UNWC), serta keterkaitan tidak langsung dengan UNCLOS 1982. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun negara-negara berhak memanfaatkan sumber daya air di wilayahnya, pembangunan infrastruktur seperti bendungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban kerja sama, konsultasi dan pencegahan kerugian signifikan bagi negara lain. Lebih lanjut, penelitian ini mengulas bagaimana pembangunan bendungan mengubah aliran air dan mengurangi sedimentasi, yang memperburuk kondisi iklim dan ekosistem di kawasan. Kondisi ini memicu masuknya air laut ke area pertanian serta merusak kualitas tanah. Akibatnya muncul ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat di hilir

Kata Kunci: *MRC; Sungai Mekong; Sungai Lintas Batas*

ABSTRACT

The Mekong River, one of the longest transboundary rivers in the world, serves as a vital source of life for the countries along its course. Its utilization for irrigation, fisheries, hydropower, and transportation creates complexities between upstream and downstream countries, particularly regarding dam construction, which significantly impacts the river's flow and ecosystem. These conflicting interests are compounded by the absence of upstream states from the Mekong River Commission (MRC) and the lack of clarity in international legal frameworks governing transboundary rivers. This study examines the dynamics of water resource conflicts in the Mekong River and evaluates the international legal instruments available for dispute settlement, despite their limited binding force. This research employs a normative legal method to examine the principles of international law, the 1997 United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (UNWC), and its indirect linkage with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The results of the study indicate that while states retain the right to utilize water resources within their territories, infrastructure development such as dams must comply with obligations of cooperation, consultation, and the prevention of significant harm. Additionally, this study highlights how dam construction alters water flow and reduces sedimentation, worsening climate and ecosystem conditions in the region. This condition triggers seawater intrusion into agricultural areas and damages soil quality. As a result, it poses a serious threat to food security and the livelihoods of downstream communities.

Keywords: *Mekong River; MRC; Transboundary River*

I. PENDAHULUAN

Sungai merupakan sumber daya alam penting yang sering kali melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara sehingga aliran yang melintas di lebih dari satu wilayah disebut sungai lintas batas (*Transboundary Rivers*)¹ dan menjadi sumber utama penghidupan masyarakat di wilayah yang dilaluinya. Aliran air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti irigasi pertanian, misalnya di Thailand dan Vietnam yang mengandalkan air Sungai Mekong untuk mengairi sawah padi², penangkapan ikan sebagai sumber makanan bagi jutaan penduduk, pembangkit tenaga listrik air serta lintasan berbagai kapal dagang internasional. Contoh tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan pada sungai lintas batas menimbulkan kompleksitas hubungan antarnegara yang mencakup pembagian hak guna air, potensi sengketa atas proyek infrastruktur seperti bendungan, dan dampak lingkungan lintas batas. Setiap negara

¹ Sahana, Mehebub, Md Kutubuddin Dhali, Sarah Lindley. "Global Disparities in Transboundary River Research have Implications for Sustainable Management", *Communications Earth & Environment*, Vol. 5, No. 786, 2024, pp. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01928-0>.

² Penulis. "Sungai Mekong Terdapat di Negara Apa? Ini Jawabannya" Kumparan.com, 21 Mei 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sungai-mekong-terdapat-di-negara-apa-ini-jawabannya-22mYrjEqb1i/full>.

berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan nasionalnya.

Kasus yang menonjol adalah pemanfaatan Sungai Mekong di Asia. Sungai Mekong merupakan salah satu sungai lintas antarnegara terpanjang di dunia yang mengalir dari dataran tinggi Tibet, ke Tiongkok, melalui Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja sebelum memasuki wilayah delta Vietnam.

Sungai ini menjadi sumber kehidupan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena menyediakan air, sumber penangkapan ikan, sumber daya alam penangkaran, sumber makanan utama dari suatu negara serta pertumbuhan ekonomi bagi orang yang tinggal di DAS-nya. Sungai ini memiliki sejarah panjang sebagai tulang punggung irigasi pertanian di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam mendukung produksi padi.³ Sejak berabad-abad lalu, masyarakat di Lembah Mekong telah mengembangkan sistem irigasi tradisional yang memanfaatkan limpahan air musim hujan untuk mengairi sawah. Perkembangan teknologi irigasi modern pada abad 20, termasuk pembangunan bendungan dan kanal di Thailand, Vietnam dan Kamboja, semakin memperluas areal tanam padi.⁴ Peran sungai ini telah berlangsung lintas generasi dan tetap menjadi sumber utama penghidupan. Namun, masyarakat di sepanjang alirannya, kerap menghadapi tantangan berulang seperti kekeringan, perubahan aliran akibat bendungan, serta sengketa pembagian air. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai bagaimana aliran dan pemanfaatan sungai dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan di tengah kepentingan berbagai negara yang dilaluinya.

Negara hulu (Tiongkok dan Laos) dan hilir (Kamboja dan Vietnam) memiliki persepsi yang berbeda, negara-negara hulu merasa berhak memanfaatkan sungai di wilayahnya secara maksimal, sedangkan negara-negara hilir khawatir atas dampak penggunaan air tersebut terhadap aliran air yang mereka terima. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi, sejumlah negara mulai membangun bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air secara sepihak dengan memanfaatkan aliran sungai tersebut.

³ Vu, An V, Kent G. Hortle, Du N. Nguyen. "Factors Driving Long Term Declines in Inland Fishery Yields in the Mekong Delta. *Water Journal MDPI*, Vol. 13, No. 8, Article 1005, p. 3. DOI: <https://doi.org/10.3390/w13081005>.

⁴ Ang, Wei Jing Ang, et.al. "Dams in the Mekong: a Comprehensive Database, Spatiotemporal Distribution, And Hydropower Potentials." *Earth System Science Data*, Vol. 16, Issue 3, p. 1210. DOI: <https://doi.org/10.5194/essd-16-1209-2024>.

Proyek-proyek bendungan raksasa, terutama yang dibangun di hulu sungai oleh Tiongkok seperti Xiaowan Dam dan Nuozhadu Dam serta oleh Laos seperti Xayaburi Dam dan Don Sahong Dam menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan negara-negara hilir seperti Kamboja dan Vietnam⁵. Dampak negatif pembangunan bendungan raksasa di hulu oleh Tiongkok dan Laos mencakup penurunan debit air, terganggunya migrasi ikan, perubahan pola sedimentasi dan masuknya air laut ke delta. Kondisi ini mengancam stabilitas ekonomi regional terutama Kamboja dan Vietnam, serta memicu ketegangan geopolitik yang kompleks⁶.

Selain itu, pembangunan bendungan juga menimbulkan kerentanan kawasan terhadap perubahan iklim dan kestabilan rantai pangan. Gangguan pola aliran menyebabkan musim tanam menjadi tidak menentu sehingga menambah tekanan bagi petani yang bergantung pada sawah tadah hujan di Delta Mekong. Berkurangnya suplai sedimen memperburuk kondisi perairan mengakibatkan penurunan stok ikan dan mengancam sumber pangan masyarakat⁷. Hal ini berdampak langsung pada ketahanan pangan di kawasan hilir, khususnya Kamboja dan Vietnam, yang sangat bergantung pada hasil pertanian Delta Mekong⁸. Dalam jangka panjang, dampak iklim yang dipicu pembangunan bendungan dapat merusak stabilitas produksi pertanian, menekan cadangan pangan nasional serta menimbulkan masalah ekonomi yang serius.

Dalam perspektif hukum internasional, sengketa antarnegara umumnya diselesaikan melalui mekanisme damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase atau peradilan internasional, dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB dan berbagai instrumen hukum khusus. Dalam konteks Sungai Mekong, sengketa yang muncul berkaitan dengan pembagian aliran air, dampak pembangunan bendungan di hulu terhadap wilayah hilir, serta penurunan kualitas ekosistem perairan. Secara ideal, hukum

⁵ Eyler, Brian, et.al. "Mekong Dam Monitor Annual Report." *Stimson.org*, 9 Desember 2024, <https://www.stimson.org/2024/mekong-dam-monitor-annual-report-2023-2024/>.

Mekong River Commission. Mekong River Basin 2023 State of the Basin Report. Vientiane, Mekong River Commission Documentation and Learning Centre, 2024, pp. 66-397. DOI: 10.52107/mrc.c80wb7.

⁶ Baird, Ian G., "The Downstream Impacts of Dams on The Seasonally Flooded Riverine Forests of the Mekong River in Northeastern Cambodia." *South East Asia Research*, Vol. 31, No. 4, p. 378. DOI: <https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2243584>.

⁷ Bussi, Gianbattista, et al, "Impact of Dams and Climate Change on Suspended Sediment Supply to the Mekong Delta." *Science of The Total Environment*, Vol. 755, Part 1, 2021, p. 9. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142468>.

⁸ Ridwan, Achmad Dhani Ridwan. "Dampak Pembangunan Bendungan di Tiongkok Terhadap Keamanan Pangan Negara-Negara Hilir Sungai Mekong." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, p. 276. DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.791>.

internasional seharusnya menjadi pedoman utama untuk mengatur dan menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, Tiongkok sebagai negara hulu utama tidak menjadi anggota perjanjian regional seperti *Mekong River Commission* (MRC) dan belum meratifikasi konvensi internasional terkait. Dengan demikian, Tiongkok tidak memiliki keterikatan hukum terhadap ketentuan maupun mekanisme kerja sama yang difasilitasi lembaga tersebut. Padahal MRC sendiri bertugas memfasilitasi kerja sama antarnegara anggota dalam pengelolaan sumber daya air di DAS Mekong, termasuk koordinasi pembangunan infrastruktur seperti bendungan, pemantauan kualitas air dan mitigasi bencana banjir maupun kekeringan. Ketidakterlibatan Tiongkok menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit upaya kolaborasi yang efektif, terutama dalam mengatasi isu-isu seperti penurunan debit air di hilir, perubahan pola aliran akibat bendungan di hulu dan penurunan kualitas ekosistem perairan.

Dari permasalahan yang telah dibahas di atas, tampak adanya ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam pada sungai lintas batas. Ketidakpastian ini muncul karena sungai lintas batas tidak hanya melintasi wilayah kedaulatan beberapa negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Dengan demikian, setiap perubahan dalam aliran atau pemanfaatannya berpotensi menimbulkan sengketa antarnegara, terutama ketika negara hulu memaksimalkan kepentingan nasionalnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan negara hilir. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut.

Pembahasan ini akan mengkaji kerangka hukum internasional yang mengatur pemanfaatan sungai lintas negara dengan menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach* melalui analisis prinsip-prinsip utama dalam hukum kebiasaan internasional, khususnya prinsip *equitable and reasonable utilization* dan *no significant harm* serta Konvensi PBB 1997 tentang Hukum Penggunaan Non-Navigasi Aliran Air Internasional (*United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses*) yang disingkat UNWC. Kemudian secara khusus, peneliti juga akan mengevaluasi legalitas pembangunan bendungan oleh satu negara apakah dapat dibenarkan menurut hukum internasional tanpa persetujuan atau konsultasi dengan negara-negara yang terkena dampaknya serta melakukan analisis deskriptif-analitis

dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktik pembangunan bendungan di Sungai Mekong dan mengulas keterkaitan tidak langsung dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang disingkat UNCLOS. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika konflik sumber daya air dan perspektif hukum untuk mengatasi masalah yang ada, sekaligus menarik Kesimpulan mengenai legalitas tindakan negara hulu serta dampaknya terhadap negara-negara hilir.

II. PEMBAHASAN

Hukum internasional mengatur pemanfaatan sungai lintas negara

Dalam hukum internasional, pengaturan pemanfaatan sungai lintas negara dibentuk melalui kombinasi perjanjian internasional, hukum kebiasaan dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui. Salah satu instrumen hukum yang paling signifikan adalah Konvensi PBB 1997 tentang Penggunaan Air Internasional untuk tujuan non-navigasi yang dituangkan dalam UNWC. Meskipun belum semua negara meratifikasinya, konvensi ini menjadi landasan normatif yang kuat karena prinsip-prinsip utamanya merefleksikan hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara.

Berikut penjelasan mengenai prinsip Hukum internasional menurut UNWC:

- Pasal 5 - Prinsip Pemanfaatan yang adil dan wajar (*equitable and reasonable utilization*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UNWC, pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat pada suatu wilayah lintas batas harus dengan adil dan wajar. Hal ini dapat diterapkan pada kasus Sungai Mekong, dimana pada sungai tersebut dilalui oleh berbagai negara dengan tujuan pemanfaatan yang berbeda-beda. Sehingga pemanfaatan oleh salah satu negara tidak boleh merugikan negara lain yang juga terletak pada batas sungai tersebut.

- Pasal 6 - Faktor-faktor yang relevan untuk pemanfaatan secara adil dan wajar (*Factors relevant to equitable and reasonable utilization*)

Pasal ini mengatur bahwa pemanfaatan harus dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi geografis aliran air, dampak penggunaan air, iklim, kebutuhan sosial dan ekonomi negara-negara pengguna, jumlah penduduk yang bergantung pada aliran sungai serta ketersediaan sumber daya alternatif. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada negara baik di hulu

maupun di hilir yang memiliki hak absolut atas sumber daya air, sehingga setiap negara harus mempertimbangkan kepentingannya secara proporsial

- Pasal 7 - Kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian yang signifikan (*Obligation Not to Cause Significant Harm*)

Pasal ini melengkapi prinsip pemanfaatan adil dengan menetapkan kewajiban bagi negara pengguna sungai internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian signifikan pada negara lain. Kewajiban ini mencakup perlindungan lingkungan, pencegahan polusi dan mitigasi dampak negatif yang mungkin timbul dari proyek-proyek di aliran air. Apabila kerugian tetap terjadi, negara yang bersangkutan berkewajiban mengurangi atau menghapus dampak tersebut serta memberikan kompensasi apabila diperlukan. Dengan demikian, pasal ini menegaskan prinsip pencegahan dan tanggung jawab negara atas dampak negatif yang ditimbulkan.

- Pasal 11 – 19 mengatur kewajiban prosedural seperti komunikasi, pemberitahuan dan konsultasi antarnegara lintas sungai apabila ada rencana proyek baru atau perubahan besar, maka harus memberikan notifikasi terlebih dahulu, menyediakan data serta informasi yang relevan. Negara yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bersama

Dalam tabel negara partisipasi yang dimuat dalam UNWC, hingga saat ini hanya Vietnam sebagai satu-satunya negara di kawasan aliran Sungai Mekong yang tercatat telah meratifikasi UNWC. Ratifikasi yang dilakukan Vietnam pada Mei 2014, menjadikannya sebagai negara ke 35 yang bergabung. Dengan bergabungnya Vietnam ini maka angka persyaratan minimum yang ditetapkan dalam Pasal 36 ayat (1) UNWC berhasil dipenuhi, sehingga konvensi ini resmi berlaku secara global 90 hari kemudian yaitu pada Agustus 2014.

Tanpa ratifikasi dari negara-negara lain yang juga dilintasi Sungai Mekong yakni Tiongkok, Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand, maka ketentuan-ketentuan global dalam konvensi UNWC tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi mereka. Akibatnya, prinsip-prinsip seperti pemanfaatan yang adil dan wajar, kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian signifikan, serta kewajiban pertukaran data dan informasi hanya berlaku bagi Vietnam. Sementara bagi negara lainnya, ketentuan tersebut sekadar

menjadi referensi kebijakan yang tidak memiliki kekuatan memaksa dalam kerangka hukum internasional khususnya terkait pembangunan bendungan dan pengelolaan infrastruktur di wilayah DAS Mekong

Prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Konvensi PBB 1997 berlanjut diadopsi dalam konteks regional. Di kawasan DAS Mekong, kerangka kerja sama formal dibentuk melalui *Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin (Mekong Agreement 1995)*, yang ditandatangani oleh Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam pada tanggal 05 April 1995. Perjanjian ini memuat prinsip penggunaan yang wajar dan adil, pencegahan kerugian yang signifikan, serta kewajiban konsultasi antarnegara sebelum melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan besar. Sebagai implementasinya, perjanjian tersebut membentuk MRC, sebuah organisasi antar pemerintah yang bertugas memfasilitasi kerja sama teknis, pengelolaan data dan koordinasi kebijakan antarnegara anggota dalam mengelola sumber daya air di DAS Mekong.

Beberapa poin penting dalam Perjanjian Mekong 1995 tersebut antara lain:

- Pasal 5 – menegaskan bahwa setiap negara anggota berhak memanfaatkan sumber daya air di DAS Mekong secara wajar dan adil (*equitable and reasonable*) dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan negara lain. Rumusan ini selaras dengan prinsip hukum Konvensi PBB 1997. Untuk memastikan pemanfaatan tersebut tidak menimbulkan sengketa antarnegara, pasal ini mengatur bahwa setiap rencana pemanfaatan air harus melalui mekanisme pemberitahuan (*notification*), konsultasi sebelumnya (*prior consultation*), atau persetujuan (*agreement*) sesuai dengan tingkat potensi dampaknya. MRC kemudian menyusun *Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement* yang disingkat PNPCA, yaitu seperangkat prosedur pelaksanaan untuk mengatur secara rinci mengenai penyampaian informasi, penilaian teknis, konsultasi antarnegara dan pengambilan keputusan atas rencana pemanfaatan air lintas batas. PNPCA memastikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang setara untuk menilai dampak suatu proyek sebelum dilaksanakan. Pelaksanaan prosedur ini dikoordinasikan oleh *Joint Committee*, yaitu susunan teknis dalam MRC yang beranggotakan satu perwakilan senior dari masing-masing negara anggota. *Joint Committee* ini bertanggung jawab untuk menilai rencana proyek, memfasilitasi

pertukaran data serta memastikan bahwa prosedur perjanjian dijalankan secara transparan.

Berdasarkan pasal 5, disepakati lebih lanjut atas mekanisme pemberitahuan (*notification*), konsultasi sebelumnya (*prior consultation*) dan persetujuan (*agreement*) yang diatur menurut lokasi pemanfaatan dan musim sebagai berikut:

✓ Pemanfaatan di anak Sungai dan Danau Tonle Sap

Baik untuk penggunaan di dalam (*intra-basin use*) dan keluar (*inter-basin diversion*), negara pelaksana cukup pemberitahuan resmi kepada *Joint Committee* dan tidak diperlukan persetujuan.

Danau Tonle Sap adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara yang terletak di bagian barat laut Kamboja, dekat kota Siem Reap. Danau Tonle Sap sebagai bagian strategis dalam pengelolaan terpadu DAS Mekong, sebagaimana diakui dalam kerangka kerja sama regional yang diatur oleh Perjanjian Mekong 1995. Danau ini terhubung langsung ke Mekong melalui Sungai Tonle Sap.⁹ Pada musim hujan, ketika air Mekong meluap, arus sungai ini berbalik arah dan mengalir masuk ke danau, membawa air baru sekaligus lumpur alami yang mengandung nutrisi bagi ikan dan tumbuhan air. Akibatnya luas dan kedalaman danau meningkat drastis. Sebaliknya pada musim kemarau, aliran kembali normal menuju Mekong, sehingga air dari danau mengalir keluar untuk membantu menjaga ketersediaan air di wilayah hilir.¹⁰ Mekanisme ini membuat Danau Tonle Sap berperan seperti penampung alami yang menyimpan air di musim hujan dan melepaskannya di musim kemarau, menjaga keseimbangan ekosistem di sepanjang sungai Mekong.

✓ Pemanfaatan di aliran utama Mekong

⁹ Sithirith, Mak. "The Political Ecologies of the Tonle Sap: Global, Regional and National Framework for Conservation and Development" hal 1-2, *Qeios*, 2023, p. 1-2. DOI: <https://doi.org/10.32388/8NVDR5>.

¹⁰ Tebe, Denny. "Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara yang Dilalui Sungai Mekong." *Mediaindonesia.com*, 28 April 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/765337/negara-negara-kawasan-asia-tenggara-yang-dilalui-sungai-mekong>.

Saat musim hujan, penggunaan di dalam basin cukup pemberitahuan kepada *Joint Committee*, namun penggunaan keluar basin harus konsultasi sebelumnya untuk mencapai kesepakatan bersama

Saat musim kemarau, penggunaan di dalam basin harus konsultasi sebelumnya untuk memperoleh persetujuan teknis, sedangkan penggunaan keluar basin memerlukan persetujuan resmi dari *Council* selaku pengambil keputusan tertinggi MRC

Dengan pengaturan ini, maka semakin besar potensi dampak suatu proyek, maka semakin tinggi pula tingkat persetujuan yang dibutuhkan

- Pasal 6 – Mengatur kewajiban negara anggota untuk memelihara aliran air minimum di aliran utama Sungai Mekong pada saat musim kemarau dan aliran tertinggi yang dapat diterima pada saat musim penghujan. Ketentuan ini bertujuan menjaga stabilitas debit air agar tidak terganggu signifikan terhadap keseimbangan lingkungan dan kegiatan sosial-ekonomi lintas batas.

Pasal 6 secara khusus menyoroti peranan Danau Tonle Sap sebagai bagian integral dari sistem tata air Sungai Mekong dengan memiliki kewajiban negara anggota untuk memastikan danau tersebut tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga keseimbangan aliran sekaligus memelihara kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya

- Pasal 7 – Pencegahan Kerugian Signifikan (*prevention of significant harm*).
Pasal ini mewajibkan setiap negara anggota untuk mencegah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian signifikan terhadap negara lain di DAS Mekong. Apabila kerugian tersebut tetap terjadi, negara pelaku berkewajiban menghentikan kegiatan yang menimbulkan dampak dan melakukan konsultasi dengan negara yang terdampak guna mencari solusi yang dapat diterima bersama.

- Pasal 9 – Kebebasan Bernavigasi

Pasal ini menegaskan bahwa negara anggota MRC menjamin kebebasan navigasi di aliran utama Sungai Mekong untuk kepentingan perdagangan internasional. Prinsip ini memberikan hak yang sama bagi setiap anggota untuk memanfaatkan jalur air tersebut sebagai sarana transportasi lintas batas, baik untuk barang

maupun penumpang, sepanjang wilayah sungai yang dapat dilayari. Negara anggota juga berkewajiban memelihara kondisi fisik alur pelayaran agar tetap aman dan dapat digunakan. Kewajiban ini mencakup pengerukan, perbaikan atau pengaturan lalu lintas sungai secara bersama di bawah koordinasi MRC

Untuk melengkapi pembahasan mengenai Konvensi PBB 1997 dan Perjanjian Mekong 1995, penelitian ini juga menyoroti relevansi Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS). UNCLOS secara utama mengatur tata kelola laut dan samudra, namun perjanjian ini juga memiliki hubungan langsung terhadap pengelolaan sumber daya air lintas batas, terutama pada wilayah muara, danau, sungai, kanal dan jalur pelayaran yang menghubungkan sungai besar dengan laut.

UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang bersifat komprehensif, menetapkan kerangka hukum bagi pengaturan laut dan samudra di seluruh dunia. Instrumen ini diadopsi pada tahun 1982 sebagai hasil dari proses panjang perundingan multilateral yang berlangsung selama hampir satu dekade dalam forum Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang dikenal dengan nama UNCLOS III. UNCLOS mengatur berbagai aspek penting hukum laut internasional, mulai dari perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen hingga dasar laut internasional. Perairan teritorial ditetapkan sejauh 12 mil laut dari garis pangkal negara pantai, di mana negara tersebut memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara, permukaan laut, serta dasar laut di wilayah tersebut.¹¹

Berdasarkan buku 1982 UNCLOS : *Perspectives from the Indian Ocean* (2021), zona maritim yang diatur dalam perjanjian tersebut antara lain¹² :

- Laut Teritorial
Zona hingga 12 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh, termasuk hak untuk menetapkan peraturan
- Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

¹¹ Dmitry, "United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): Governing Oceanic Jurisdictions." *Maritimepage.com*, 28 Juli 2025, <https://maritimepage.com/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-unclos/>.

¹² Penulis. "Apa yang Dimaksud UNCLOS 1982, Pengertian dan Fungsinya." *Kumparan.com*, 21 Mei 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/apa-yang-dimaksud-unclos-1982-pengertian-dan-fungsinya-22mSjLtqrgG>.

Zona hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut.

- **Landas Kontinen**

Dasar laut yang memanjang dari Pantai hingga tepian landas kontinen atau 200 mil laut, tergantung mana yang lebih jauh. Pada zona ini negara pantai memiliki hak eksklusif untuk sumber daya dasar laut.

- **Laut Lepas**

Semua area laut di luar ZEE, yang bebas digunakan oleh semua negara sesuai dengan hukum internasional

- **Zona Tambahan**

Zona hingga 24 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai dapat menegakkan hukum terkait bea cukai, perpajakan, imigrasi dan kesehatan.

Beberapa ketentuan UNCLOS yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air lintas batas meliputi :

- **Pasal 8 – Pengaturan Perairan Pedalaman dan Muara**

Perairan yang terletak di sisi darat garis pangkal dianggap sebagai perairan pedalaman, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh.

- **Pasal 17, 18, 19 – Hak Lintas Damai**

Mengatur hak kapal asing untuk melintas laut teritorial suatu negara, termasuk di pintu masuk muara sungai, selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai.

- **Pasal 38 sampai dengan 44 – Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dan Lintas Transit**

Mengatur negara kepulauan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan sungai dengan laut terbuka

- **Pasal 192 sampai dengan 237 – Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Laut**

Mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, yang dapat berdampak pada pengelolaan limbah atau sedimen dari aliran sungai ke laut

Walaupun cakupan utama UNCLOS adalah wilayah laut dan samudra, konvensi ini tetap memiliki relevansi terhadap pengaturan sungai lintas batas seperti Mekong. Dua isu yang paling relevan dalam konteks ini adalah:

- Pintu sungai ke laut

UNCLOS mengatur cara menetapkan garis pangkal (*baseline*) di mulut sungai yang mengalir langsung ke laut. Garis ini menjadi dasar untuk mengukur zona maritim seperti laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Oleh karena itu, bagi negara-negara pesisir di DAS Mekong, seperti Vietnam, ketentuan UNCLOS ini relevan dalam menentukan batas maritim mereka di Laut Cina Selatan.

- Lingkungan Laut

UNCLOS juga memuat ketentuan luas mengenai perlindungan lingkungan laut. Kegiatan yang terjadi di hulu sungai, seperti polusi dari industri atau perubahan sedimentasi akibat pembangunan bendungan, yang kemudian mengalir ke laut dan berdampak pada ekosistem serta kualitas perairan. Dalam hal ini, UNCLOS dapat menjadi kerangka hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lintas batas yang timbul di wilayah maritim negara lain.

Berdasarkan pembahasan atas ketiga instrumen di atas, prinsip-prinsip yang relevan dapat diringkas menjadi tiga prinsip utama, sebagai berikut:

- Membagi air secara adil dan wajar.

Berdasarkan UNWC Pasal 5 dan Perjanjian Mekong 1995, pembagian air harus mempertimbangkan kebutuhan negara hilir seperti Kamboja dan Vietnam, yang bergantung pada Mekong untuk irigasi padi, perikanan Danau Tonle Sap, dan suplai air bersih di Delta Mekong. Pembangunan bendungan di hulu tanpa mekanisme pembagian yang disepakati telah memicu penurunan debit air di musim kering, yang secara langsung mengganggu siklus pertanian dan ekonomi di wilayah hilir.

- Mencegah kerugian signifikan pada negara lain.

Prinsip ini ditegaskan dalam UNWC Pasal 7, yang mewajibkan negara untuk menghindari tindakan yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara lain. Pembangunan bendungan raksasa di hulu telah menghambat migrasi ikan ke

Danau Tonle Sap, mengubah pola sedimentasi dan memperparah masuknya air laut di Delta Mekong. Dampak ini bukan hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan jutaan penduduk di Kamboja dan Vietnam. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penerapan kewajiban prosedural antarnegara hilir agar dapat mengantisipasi potensi kerugian sejak awal.

- Menjalankan kewajiban pemberitahuan serta konsultasi.

Perjanjian Mekong 1995 dan UNWC Pasal 11-19 mengatur kewajiban negara hulu untuk memberi pemberitahuan dini dan melakukan konsultasi sebelum membangun infrastruktur besar. Dalam praktiknya, Tiongkok yang bukan anggota penuh MRC hanya berbagi data aliran air secara terbatas. Sementara itu Laos memang melakukan konsultasi formal tetapi sering kali hanya sebatas prosedur administratif, tanpa menghasilkan kesepakatan yang signifikan dengan negara hilir. Ketidadaan mekanisme konsultasi yang transparan ini meningkatkan ketegangan geopolitik dan mengurangi peluang untuk mengambil tindakan pencegahan sebelum proyek berjalan.

Pelanggaran pada salah satu aspek ini berpotensi membuat pembangunan bendungan tidak sejalan dengan kewajiban negara menurut hukum internasional, sebagaimana diatur dalam UNWC, Perjanjian Mekong 1995 maupun prinsip hukum kebiasaan internasional. Ketidakpatuhan ini bukan hanya menimbulkan implikasi hukum seperti tuntutan pertanggungjawaban internasional, tetapi juga berisiko merusak hubungan diplomatik antarnegara. Kondisi ini membuat kepercayaan antarnegara anggota MRC kian menurun dan mekanisme kerja sama regional melemah. Akibatnya masyarakat Kamboja dan Vietnam yang sangat bergantung pada keberlanjutan aliran sungai tersebut terus menanggung kerugian. Meskipun kerugian tersebut dirasakan oleh negara hilir, namun hingga kini belum pernah diajukan gugatan resmi antarnegara Mekong ke forum internasional. Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui proses PNPCA di MRC atau diplomasi secara bilateral.

Selain menimbulkan konsekuensi hukum dan kerusakan lingkungan, pembangunan bendungan di aliran utama Sungai Mekong juga berdampak lebih luas terhadap keseimbangan iklim setempat dan ketersediaan pangan di kawasan tersebut. Perubahan debit dan pola aliran sungai tidak hanya mempengaruhi habitat perairan, tetapi juga

berdampak pada pola curah hujan, meningkatkan risiko kekeringan maupun banjir serta mempercepat degradasi lahan di wilayah hilir. Kondisi ini pada akhirnya mengurangi hasil produksi pertanian, khususnya padi di Delta Mekong, sekaligus menurunkan hasil tangkapan ikan yang selama ini menjadi sumber pangan bagi jutaan penduduk.¹³ Dengan demikian persoalan Mekong bukan hanya menyangkut pelanggaran prinsip hukum internasional, melainkan juga menyentuh aspek penting berupa iklim dan pangan yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.¹⁴

Pembenaran pembangunan bendungan oleh suatu negara menurut hukum internasional

Pembangunan bendungan di aliran utama Sungai Mekong merupakan isu yang cukup krusial dalam hubungan antarnegara yang dilalui aliran sungai tersebut mulai dari hulu di Tiongkok hingga ke hilir di negara-negara Asia Tenggara. Manfaat ekonomi yang didapati dari bendungan seperti energi listrik, pengendalian banjir dan irigasi pertanian, seringkali menimbulkan konflik ekologis, sosial dan politik antarnegara yang melintasi aliran sungai.

Isu ini dapat dilihat melalui dua sudut utama yaitu keberadaan bendungan yang melintasi Sungai Mekong dan kerangka hukum internasional yang mengaturnya.

Bendungan yang melintasi Sungai Mekong sebagai berikut:

1. Tiongkok (hulu – Lancang Jiang, Provinsi Yunnan)

Berada di bagian hulu Sungai Mekong atau Lancang Jiang, di wilayah Yunnan, Tiongkok membangun bendungan besar yang dikenal sebagai Lancang Cascade. Di antaranya adalah Manwan, Dachaoshan, Jinghong, Xiaowan, Nuozhadu, Gongguoqiao dan Miaowei¹⁵. Bendungan ini berfungsi sebagai pemasok listrik, pengendali banjir dan penopang irigasi pertanian di wilayah Tiongkok. Akan

¹³ Phuong, Tran Trong. "Impact of Climate Change on Agricultural Production and Food Security : A Case Study in the Mekong River Delta of Vietnams." *Sustainability Journal MDPI*, Vol. 16, Issue 17, p. 1. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16177776>.

¹⁴ Morovati, Khosro, et.al. "Fishery and Agriculture Amidst Human Activities and Climate Change in the Mekong River : A Review of Gaps in Data and Effective Approaches Towards Sustainable Development." *Journal of Hydrology*, Vol. 644, 2022, p. 2. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132043>.

¹⁵ International River. "Environmental and Social Impacts of Lancang Dams." *Riversourcehub.org*, https://www.riverresourcehub.org/wp-content/uploads/files/attached-files/ir_lancang_dams_researchbrief_final.

tetapi pengoperasian bendungan ini membawa dampak negatif bagi Laos dan Kamboja yang kerap kehilangan hasil tangkapan ikan akibat pelepasan air yang tidak menentu. Di sisi lain, upaya komunikasi dengan Tiongkok tidak berjalan efektif, karena Tiongkok bukan anggota penuh MRC, sehingga mekanisme koordinasi yang dilakukan bersifat terbatas.

2. Laos (Mekong tengah)

Geografis Laos yang tanpa laut, menjadikan Mekong sebagai jalur penghubung ke negara tetangga. Laos memiliki bendungan Xayaburi dan Don Sahong. Sementara bendungan dalam pembangunan adalah Luang Prabang, Pak Beng dan Pak Lay Dam. Bendungan Xayaburi menghasilkan listrik yang diekspor ke Thailand sehingga memberikan devisa bagi negaranya. Bendungan lainnya seperti Don Sahong menjadi bagian penting dalam strategi energi Laos dan memperkenalkan “Laos sebagai *Battery of Southeast Asia*”¹⁶

3. Thailand (berbatasan dengan Mekong)

Thailand tidak memiliki bendungan di aliran utama Sungai Mekong karena sungai tersebut menjadi perbatasan langsung dengan Laos. Setiap rencana pembangunan di aliran utama sungai otomatis harus mendapatkan persetujuan lintas negara, sebab dampaknya akan langsung dirasakan oleh Laos yang berada di seberang aliran tersebut. Selain itu, pengalaman negatif Thailand akibat pembangunan bendungan Pak Mun Dam di anak sungai Mekong yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan dan terganggunya mata pencaharian ribuan nelayan karena terhambatnya migrasi ikan, membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam merencanakan pembangunan bendungan di aliran utama. Daripada menanggung biaya tinggi dan risiko sosial tersebut, Thailand memilih jalur impor listrik¹⁷ dari Laos yang gencar mengembangkan sektor energi hidroelektriknya.

¹⁶ Teets, Jessica C., et.al. “The Battery of Southeast Asia: Challenges to Building a Regional Transmission Grid.”, *Eurasiareview.com*, 10 April 2024, fpri.org/article/2024/04/the-battery-of-southeast-asia-challenges-to-building-a-regional-transmission-grid/?utm_source.

¹⁷ *Idem*.

Bagi Thailand mengimpor listrik dari Laos yang mengklaim sebagai “Battery of Southeast Asia” jauh lebih murah dibandingkan dengan menanggung biaya tinggi Pembangunan bendungan di aliran utama Sungai Mekong

4. Kamboja (hilir menengah)

Rencana pembangunan Bendungan Sambor Dam dan Stung Treng Dam di aliran utama Sungai Mekong sebagai mega proyek energi mencerminkan upaya Kamboja untuk meningkatkan kemandirian energi sekaligus membuka peluang untuk ekspor listrik. Namun dalam studi teknis memprediksi dampak negatif terhadap suplai ikan dan berkurangnya sedimentasi di Delta Vietnam.¹⁸ Karena kuatnya tekanan dan protes internasional, hingga kini rencana tersebut belum terealisasi¹⁹. Meski demikian Kamboja memiliki sejumlah pembangkit listrik tenaga air di luar aliran utama seperti Lower Sesan 2, Kamchay dan Stung Tatay yang menjadi sumber energi bagi negaranya. Namun Pembangunan bendungan Lower Sesan 2 membawa dampak sosial seperti ribuan warga harus direlokasi²⁰ dan nelayan kehilangan mata pencaharian akibat berkurangnya populasi ikan²¹

5. Vietnam (delta – muara Mekong di Laut Cina Selatan)

Seperti diketahui, Delta Mekong adalah pusat pertanian dan perikanan Vietnam sekaligus penghasil utama beras ekspor.²² Namun, kawasan vital ini mengalami kerusakan akibat pembangunan bendungan di hulu, padahal Vietnam sendiri tidak membangun bendungan besar di aliran utama sungai.²³

Aliran air yang berkurang dan sedimen yang tertahan di bendungan hulu telah membuat delta Mekong berubah. Air laut kini masuk lebih jauh ke daratan dan

¹⁸ International Rivers. “Riverscope, Case Study: Sambor, Cambodia Summary.” *Riverscope.org*, Agustus 2021, <https://riverscope.org/wp-content/uploads/2021/09/Case-Study-Sambor-summary-final.pdf>.

¹⁹ *Idem*.

²⁰ Amarthalingam, Sangeetha, “Cambodians Struggle to Retain Their Identity After Being Displaced by Dam.” *Dialogue.earth*, 16 Juni 2021, <https://dialogue.earth/en/justice/cambodians-struggle-after-being-displaced-by-lower-sesan-2/>

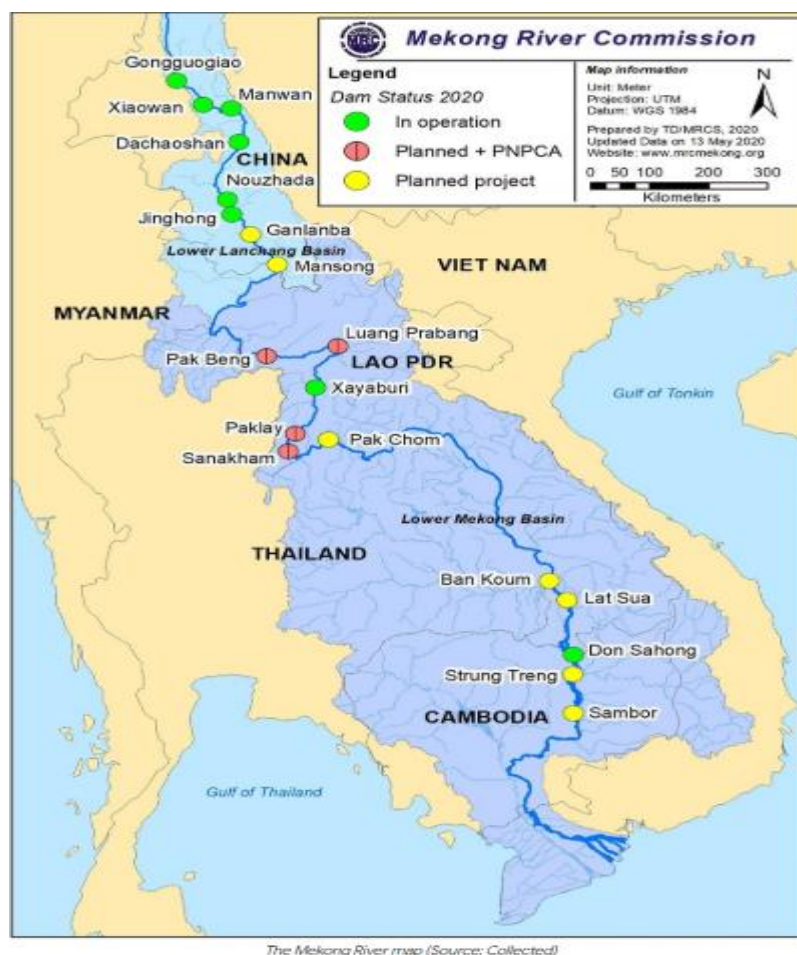
²¹ *Idem*.

²² Anh, Dao The, Thai Van Tinh, Nguyen Ngoc Vang, “The Domestic Rice Value Chain in the Mekong Delta.” *Springer Natural Link*, 2020, pp. 375-395. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0998-8_18.

²³ Kapoor, Kanupriya, et.al. “Starving the Mekong.” *Reuters.com*, 15 Desember 2022, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ENVIRONMENT/MEKONG/egpbyyadnvq/?utm_source.

tanah persawahan menjadi tanah asin.²⁴ Sedimen yang dulu menyuburkan tanah kini menjadi berkurang. Vietnam, meski tidak membangun bendungan di aliran utama Mekong, namun harus menanggung dampak terbesar dari pembangunan di negara-negara hulu.

Gambar berikut memperjelas lokasi bendungan utama, serta alur sedimen menuju Delta Mekong yang menjadi fokus analisis dampak pembangunan bendungan (sumber Vinpearl.com, The Mekong River Map: The World's 12 th longest river from source to mouth, 12 Jan 2024)



Kerangka Hukum yang relevan dalam menganalisa Pembangunan Bendungan di Sungai Mekong

²⁴ Tuu Thanh, Nguyen, et.al. "Salinity intrusion Trends Under the Impacts of Upstream Discharge and Sea Level Rise Along the Co Chien River and Hau River in the Vietnamese Mekong Delta." *Climate Journal MDPI*, Vol. 11, No. 3, 2023, p. 2. DOI: <https://doi.org/10.3390/cli11030066>.

Pembangunan bendungan di aliran utama Sungai Mekong pada dasarnya berada dalam cakupan UNWC 1997, khususnya pasal 5 (*equitable and reasonable utilization*) dan pasal 7 (*Obligation Not to Cause Significant Harm*)

Di tingkat regional, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam *Mekong Agreement* 1995 yang membentuk MRC sebagai lembaga kerja sama antarnegara anggota yaitu Laos, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Perjanjian ini juga menetapkan mekanisme PNPCA yang mewajibkan konsultasi sebelum pembangunan bendungan di badan utama Mekong. Namun, Tiongkok tidak menjadi anggota baik dalam Mekong Agreement maupun UNWC dan hanya berstatus sebagai mitra dialog MRC. Akibatnya proyek-proyek bendungan yang dibangun oleh Tiongkok tidak tunduk pada kewajiban konsultasi formal lintas batas.

Selain itu, UNCLOS memiliki keterkaitan langsung karena memuat kewajiban negara untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan laut akibat pembangunan bendungan di aliran sungai termasuk perubahan aliran sedimen dan instansi air laut yang berdampak pada Delta Mekong.

Dengan kerangka hukum tersebut, prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya akan lebih jelas apabila ditelaah melalui uraian praktik pembangunan bendungan di sepanjang Sungai Mekong. Analisis berikut menelaah peran masing-masing negara, mulai dari Tiongkok, untuk menilai sejauh mana kebijakan mereka sejalan dengan kewajiban hukum internasional, sebagai berikut :

1. Tiongkok

Tiongkok membangun bendungan-bendungan besar di hulu Mekong tanpa melalui PNPCA. Dari perspektif kedaulatan, Tiongkok berhak memanfaatkan air di wilayahnya. Namun, bila dikaitkan dengan prinsip UNWC, khususnya Pasal 7 tentang “*no significant harm*”, Tiongkok berisiko melanggar kewajiban internasional karena debit air yang berubah drastis telah berdampak signifikan pada nelayan Laos, Kamboja, hingga Vietnam. Ketidakikutsertaan Tiongkok dalam MRC membuat negara hilir sulit menuntut transparansi. Secara hukum, pembangunan bendungan Tiongkok dapat dibenarkan dari perspektif kedaulatan teritorial, tetapi secara normatif tidak memenuhi standar internasional tentang pencegahan kerugian signifikan.

Tiongkok sebagai negara hulu mengendalikan aliran dari Lancang melalui pembangunan bendungan, hal ini berdampak pada berkurangnya sedimen dan

perubahan debit yang berimplikasi pada ketersediaan air dan produktivitas pertanian di hilir²⁵

2. Laos

Sebagai salah satu anggota MRC, Laos telah melaksanakan prosedur PNPCA dalam pembangunan bendungan, sehingga secara formal memenuhi notifikasi dan konsultasi sebagaimana diatur dalam Mekong Agreement 1995. Namun dengan memposisikan diri sebagai “Battery of Southeast Asia”, Laos jelas lebih mengutamakan kepentingan nasional dan keuntungan ekonominya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana Laos menjalankan kewajibannya berdasarkan hukum internasional untuk mencegah kerugian signifikan terhadap negara-negara hilir.

Laos menjadikan bendungan sebagai strategi pembangunan ekonomi, namun perubahan hidrologi yang ditimbulkan menekan keseimbangan lingkungan dan hasil pertanian - perikanan di kawasan.²⁶

3. Thailand

Thailand dapat dianggap bijak sebagai anggota MRC karena tidak membangun bendungan di aliran utama Sungai Mekong sehingga terhindar dari potensi konflik lintas batas. Namun dibalik sikap tersebut, Thailand menjadi konsumen utama listrik dari proyek bendungan Laos. Hal ini berarti Thailand juga memiliki andil tidak langsung dalam kerusakan ekosistem Mekong, karena permintaan energinya turut mendorong pembangunan bendungan oleh Laos yang menimbulkan dampak lintas batas.

Thailand meskipun bukan negara hilir utama, tetap berdampak dari berkurangnya pasokan air dan menurunnya populasi ikan di anak-anak sungai Mekong yang mempengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.²⁷

²⁵ Olson, Kenneth Ray & Wadslin Frenelus. “Environmental and Human Impacts of Lancang-Mekong Mainstem and Tributary Dams on China, Laos, Thailand, Myanmar, Cambodia, and Vietnam.” *Journal of Soil Science*, Vol. 14, No. 10, p. 558. DOI: <https://doi.org/10.4236/ojss.2024.1410029>.

²⁶ Morovati, Khosro, et.al. *Op.cit.* p. 4-5.

²⁷ Sor, Ratha, et.al. “Fish Biodiversity Declines with Dam Development in the Lower Mekong Basin.” *Pubmed, National Library of Medicine*, Vol. 13, No. 1, p. 2. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35665-9>.

4. Kamboja

Studi teknis MRC yang memperingatkan dampak ekologis besar, mulai dari hilangnya jalur migrasi ikan hingga penurunan suplai sedimen ke Delta Vietnam, mendorong Kamboja untuk menunda pembangunan Sambor dan Stung Treng Dam.²⁸ Tekanan masyarakat sipil dan kekhawatiran akan konflik regional, memperkuat keputusan pemerintah Kamboja untuk melakukan penghentian sementara selama sepuluh tahun (2020-2030) atas proyek bendungan di aliran utama Sungai Mekong. Langkah ini memperlihatkan itikad baik Kamboja dalam menjalankan prinsip *no significant harm*, meskipun kebutuhan energi domestiknya besar, Kamboja memilih menahan diri demi menghindari konflik lintas batas.²⁹ Seperti disampaikan oleh Marc Goichot, *WWF Freshwater Lead Asia Pacific*, “Keputusan Kamboja ini merupakan contoh tepat bagi negara-negara lain, karena memahami bahwa sungai yang tetap mengalir bebas memberikan manfaat tak ternilai bagi manusia maupun spesies liar yang bergantung padanya”³⁰

Kamboja sangat bergantung pada Danau Tonle Sap. Perubahan siklus banjir akibat bendungan di hulu mengganggu migrasi ikan dan menurunkan hasil tangkapan, padahal sektor ini merupakan sumber pangan utama penduduk³¹

5. Vietnam

Sebagai negara hilir terakhir, Vietnam tidak membangun bendungan besar di aliran utama Sungai Mekong, namun menanggung dampak paling serius. Penerapan prinsip *no significant harm* dan *equitable utilization* dalam hukum internasional menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya bagi Vietnam.

²⁸ Ratcliffe, Rebecca, “Cambodia Scraps Plans for Mekong Hydropower Dams.” *Theguardian.com*, 20 Maret 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams>.

²⁹ Penulis, Cambodian Government’s Decision to Suspend Hydropower Dam Development on the Mekong River, *Worldwildlife.org*, 19 Maret 2020,, <https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-statement-on-cambodian-government-s-decision-to-suspend-hydropower-dam-development-on-the-mekong-river>.

³⁰ *Idem*.

³¹ Roney, Tyler, “Damming the Mekong: China, Laos, Cambodia and the Fate of Tonle Sap Lake.” *Apjif.org*, 15 Mei 2020, <https://apjif.org/2020/10/roney> and <https://resolve.cambridge.org/core/journals/asia-pacific-journal/article/damming-the-mekong-china-laos-cambodia-and-the-fate-of-tonle-sap-lake/393DA692E32AE13F1374117AD7A96DA2>.

Kesenjangan ini semakin nyata karena MRC tidak memiliki mekanisme penegakan yang mengikat sehingga Vietnam hanya dapat menyampaikan protes melalui forum konsultasi atau diplomasi bilateral. Kemudian dalam kerangka UNCLOS, berkurangnya suplai sedimen telah mempercepat abrasi pesisir dan intrusi air laut di Delta Mekong juga dapat dipandang sebagai bentuk pencemaran lintas batas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak pembangunan bendungan tidak hanya dirasakan di aliran sungai, tetapi juga meluas hingga ekosistem laut, sehingga memberikan landasan hukum tambahan bagi Vietnam untuk memperjuangkan kepentingannya. Di Delta Mekong menanggung dampak paling nyata berupa intrusi air asin, kekeringan dan penurunan hasil padi. Kondisi ini menjadikan pangan sebagai isu strategis sekaligus bukti nyata pelanggaran prinsip *no significant harm*³²

Setiap negara di aliran Sungai Mekong membawa kepentingan dan strategi nasionalnya masing-masing dan kerap kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Tidak adanya mekanisme penegakan yang mengikat membuat prinsip *no significant harm* dan *equitable utilization* hanya sebagai rujukan moral saja, namun tidak dapat diwujudkan dalam praktek. Karena itu penting bagi negara-negara lintas batas untuk meninjau kembali pola pengelolaan Sungai Mekong agar tetap sejalan dengan hukum internasional dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dalam kerangka tersebut, pembangunan bendungan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat utama dalam UNWC 1997: pertama, pemanfaatan dilakukan secara wajar dan adil dengan memperhatikan kepentingan semua negara pengguna. Kedua, tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi negara-negara hilir. Ketiga, dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi serta notifikasi yang bermakna bukan sekadar formalitas.

Jika ditinjau lebih jauh, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya aspek hukum saja, melainkan juga nyata dalam bentuk terganggunya keseimbangan iklim dan berkurangnya ketersediaan pangan di kawasan hilir. Fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan bendungan sulit dibenarkan sebagai tindakan yang sejalan dengan prinsip *no significant harm*, sehingga argumentasi hukum internasional semakin menguatkan posisi negara hilir

³² Vo, Thi Anh Nguyet, Minh Tuan Cao, Ngoc Duc Nguyen, "Does Climate Change Affect Rice Yield? Evidence from the Mekong River Delta, Vietnam." *Journal of Hunan University Natural Sciences*, Vol. 51, No. 3, 2024, p. 83-84, DOI: <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.51.3.10>.

III. KESIMPULAN

Kasus Sungai Mekong menunjukkan dilema klasik antara kedaulatan negara dan kepentingan bersama. Setiap negara berhak memanfaatkan sumber daya di wilayahnya, namun sifatnya sebagai sungai lintas batas maka mengharuskan adanya tanggung jawab bersama agar tidak menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak lain. Permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya aturan hukum internasional, melainkan pada kenyataan bahwa masih ada negara yang menolak sepakat dan meratifikasi instrumen hukum yang ada, sehingga implementasi prinsip-prinsip hukum tersebut sulit diterapkan. Selama tidak ada mekanisme penegakan hukum internasional yang bersifat mengikat, konflik ini akan terus berulang. Untuk mengurangi potensi konflik tersebut perlu dilakukan diskusi terbuka antarnegara, kerja sama regional, pemberian insentif ekonomi, serta diversifikasi sumber energi yang dapat mengurangi ketergantungan pada bendungan. Dengan demikian, masa depan Mekong tidak terletak pada siapa yang paling berhak memanfaatkan, tetapi terletak pada komitmen setiap negara untuk melihat sungai ini sebagai sumber daya alam yang harus dijaga keberlangsungannya untuk generasi kini dan yang akan datang, termasuk dalam menjamin keseimbangan iklim dan ketersediaan pangan bagi masyarakat pengguna sumber daya Mekong.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ang, Wei Jing Ang, et.al. "Dams in the Mekong: a Comprehensive Database, Spatiotemporal Distribution, And Hydropower Potentials." *Earth System Science Data*, Vol. 16, Issue 3, pp. 1209-1228. DOI: <https://doi.org/10.5194/essd-16-1209-2024>.
- Anh, Dao The, Thai Van Tinh, Nguyen Ngoc Vang, "The Domestic Rice Value Chain in the Mekong Delta." *Springer Natural Link*, 2020, pp. 375-395. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0998-8_18.
- Baird, Ian G., "The Downstream Impacts of Dams on The Seasonally Flooded Riverine Forests of the Mekong River in Northeastern Cambodia." *South East Asia*

- Research*, Vol. 31, No. 4, pp. 377-399. DOI: <https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2243584>.
- Bussi, Gianbattista, et al, "Impact of Dams and Climate Change on Suspended Sediment Supply to the Mekong Delta." *Science of The Total Environment*, Vol. 755, Part 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142468>.
- Morovati, Khosro, et.al. "Fishery and Agriculture Amidst Human Activities and Climate Change in the Mekong River : A Review of Gaps in Data and Effective Approaches Towards Sustainable Development." *Journal of Hydrology*, Vol. 644, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.132043>.
- Olson, Kenneth Ray & Wadslin Frenelus. "Environmental and Human Impacts of Lancang-Mekong Mainstem and Tributary Dams on China, Laos, Thailand, Myanmar, Cambodia, and Vietnam." *Journal of Soil Science*, Vol. 14, No. 10, p. 558. DOI: <https://doi.org/10.4236/ojss.2024.1410029>.
- Phuong, Tran Trong. "Impact of Climate Change on Agricultural Production and Food Security : A Case Study in the Mekong River Delta of Vietnams." *Sustainability Journal MDPI*, Vol. 16, Issue 17, pp. 1-16. DOI: <https://doi.org/10.3390/su16177776>.
- Ridwan, Achmad Dhani Ridwan. "Dampak Pembangunan Bendungan di Tiongkok Terhadap Keamanan Pangan Negara-Negara Hilir Sungai Mekong." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, pp. 277-283. DOI: <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i2.791>.
- Sahana, Meheub, Md Kutubuddin Dhali, Sarah Lindley. "Global Disparities in Transboundary River Research have Implications for Sustainable Management", *Communications Earth & Environment*, Vol. 5, No. 786, 2024, pp. 1-17. DOI: <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01928-0>.
- Sithirith, Mak. "The Political Ecologies of the Tonle Sap: Global, Regional and National Framework for Conservation and Development" hal 1-2, *Qeios*, 2023, pp. 1-22. DOI: <https://doi.org/10.32388/8NVDR5>.
- Sor, Ratha, et.al. "Fish Biodiversity Declines with Dam Development in the Lower Mekong Basin." *Pubmed, National Library of Medicine*, Vol. 13, No. 1, p. 2. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35665-9>.

Vo, Thi Anh Nguyet, Minh Tuan Cao, Ngoc Duc Nguyen, “Does Climate Change Affect Rice Yield? Evidence from the Mekong River Delta, Vietnam.” *Journal of Hunan University Natural Sciences*, Vol. 51, No. 3, 2024, p. 83-84, DOI: <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.51.3.10>.

Vu, An V, Kent G. Hortle, Du N. Nguyen. “Factors Driving Long Term Declines in Inland Fishery Yields in the Mekong Delta. *Water Journal MDPI*, Vol. 13, No. 8, Article 1005, pp. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.3390/w13081005>.

Planara Luar

Amarthalingam, Sangeetha, “Cambodians Struggle to Retain Their Identity After Being Displaced by Dam.” *Dialogue.earth*, 16 Juni 2021, <https://dialogue.earth/en/justice/cambodians-struggle-after-being-displaced-by-lower-sesan-2/>

Dmitry, “United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): Governing Oceanic Jurisdictions.” *Maritimepage.com*, 28 Juli 2025, <https://maritimepage.com/united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-unclos/>.

Eyler, Brian, et.al. “Mekong Dam Monitor Annual Report.” *Stimson.org*, 9 Desember 2024, <https://www.stimson.org/2024/mekong-dam-monitor-annual-report-2023-2024/>.

International River. “Environmental and Social Impacts of Lancang Dams.” *Riversourcehub.org*, https://www.riverresourcehub.org/wp-content/uploads/files/attached-files/ir_lancang_dams_researchbrief_final.

International Rivers. “Riverscope, Case Study: Sambor, Cambodia Summary.” *Riverscope.org*, Agustus 2021, <https://riverscope.org/wp-content/uploads/2021/09/Case-Study-Sambor-summary-final.pdf>.

Kapoor, Kanupriya, et.al. “Starving the Mekong.” *Reuters.com*, 15 Desember 2022, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ENVIRONMENT/MEKONG/eqpbyyadnvq/?utm_source.

Mekong River Commission. Mekong River Basin 2023 State of the Basin Report. Vientiane, Mekong River Commission Documentation and Learning Centre, 2024, pp. 66-397. DOI: 10.52107/mrc.c80wb7.

- Penulis. “Apa yang Dimaksud UNCLOS 1982, Pengertian dan Fungsinya.” *Kumparan.com*, 21 Mei 2024, <https://kumparan.com/berita-terkini/apa-yang-dimaksud-unclos-1982-pengertian-dan-fungsinya-22mSjLtqrgG>.
- Penulis, Cambodian Government’s Decision to Suspend Hydropower Dam Development on the Mekong River, *Worldwildlife.org*, 19 Maret 2020,, <https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-statement-on-cambodian-government-s-decision-to-suspend-hydropower-dam-development-on-the-mekong-river>.
- Penulis. “Sungai Mekong Terdapat di Negara Apa? Ini Jawabannya” *Kumparan.com*, 21 Mei 2024, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sungai-mekong-terdapat-di-negara-apa-ini-jawabannya-22mYrjEqb1i/full>.
- Ratcliffe, Rebecca, “Cambodia Scraps Plans for Mekong Hydropower Dams.” *Theguardian.com*, 20 Maret 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/20/cambodia-scraps-plans-for-mekong-hydropower-dams>.
- Roney, Tyler, “Damming the Mekong: China, Laos, Cambodia and the Fate of Tonle Sap Lake.” *Apjff.org*, 15 Mei 2020, <https://apjff.org/2020/10/roney> and <https://resolve.cambridge.org/core/journals/asia-pacific-journal/article/damming-the-mekong-china-laos-cambodia-and-the-fate-of-tonle-sap-lake/393DA692E32AE13F1374117AD7A96DA2>.
- Tebe, Denny. “Negara-Negara Kawasan Asia Tenggara yang Dilalui Sungai Mekong.” *Mediaindonesia.com*, 28 April 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/765337/negara-negara-kawasan-asia-tenggara-yang-dilalui-sungai-mekong>.
- Teets, Jessica C., et.al. “The Battery of Southeast Asia: Challenges to Building a Regional Transmission Grid.”, *Eurasiareview.com*, 10 April 2024, fpri.org/article/2024/04/the-battery-of-southeast-asia-challenges-to-building-a-regional-transmission-grid/?utm_source.
- Tuu Thanh, Nguyen, et.al. “Salinity intrusion Trends Under the Impacts of Upstream Discharge and Sea Level Rise Along the Co Chien River and Hau River in the Vietnamese Mekong Delta.” *Climate Journal MDPI*, Vol. 11, No. 3, 2023, p. 2. DOI: <https://doi.org/10.3390/cli11030066>.